

Model Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir: Menyeimbangkan Kepentingan Ekonomi, Devisa Negara, dan Keberlanjutan Ekosistem serta Pengembangan Indeks Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Berbasis Lanskap di Provinsi Sulawesi Tenggara

Rustam BR¹, La Rianda Baka²

Program Doktor (S3) Ilmu Pertanian – Manajemen Hutan, Universitas Haluoleo, Indonesia¹.
Universitas Haluoleo, Indonesia²

rustamburaerah@gmail.com¹

Kata Kunci:

Kelapa Sawit, Tata Kelola, Keberlanjutan, Lanskap, ISPO, Rantai Nilai, Pekebun Rakyat, Sulawesi Tenggara, Indeks Keberlanjutan

Abstrak

Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas strategis Indonesia yang memiliki kontribusi penting terhadap produksi pertanian, pendapatan masyarakat, industri hilir, perdagangan internasional, dan ketahanan energi. Namun demikian, pengembangan sawit juga menghadapi tantangan berupa deforestasi, degradasi lahan, perubahan fungsi hidrologis, kehilangan biodiversitas, konflik tenurial, lemahnya *traceability*, serta kesenjangan kapasitas antara perusahaan perkebunan dan pekebun rakyat. Persoalan tersebut menunjukkan adanya dilema antara kepentingan ekonomi dan devisa negara dengan tuntutan keberlanjutan ekologis dan sosial. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki konteks yang berbeda dibandingkan provinsi sentra sawit utama di Sumatra dan Kalimantan. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola yang mempertimbangkan karakteristik sosial-ekologis dan kelembagaan wilayah. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari hulu ke hilir serta merumuskan Indeks Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Berbasis Lanskap (ITKSB-L) yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan desain eksploratif-sekuensial yang mengintegrasikan studi literatur, analisis kebijakan, analisis rantai nilai, penilaian pakar, survei pemangku kepentingan, dan analisis spasial. Hasil sintesis menunjukkan bahwa tata kelola sawit berkelanjutan perlu dibangun melalui lima dimensi utama, yaitu tata kelola ruang dan legalitas, keberlanjutan ekologis, kinerja ekonomi, keberlanjutan sosial, serta tata kelola kelembagaan dan rantai nilai. Kelima dimensi tersebut kemudian dioperasionalkan menjadi ITKSB-L dengan skala 0–100. Model ini menempatkan keberlanjutan bukan sebagai instrumen sertifikasi semata, tetapi sebagai sistem tata kelola lintas aktor dan lintas skala yang menghubungkan kepastian lahan, produktivitas, konservasi, pemberdayaan pekebun, *traceability*, hilirisasi, dan akses pasar. Kontribusi utama penelitian adalah pengembangan model indeks yang mengintegrasikan pendekatan *social-ecological systems*, *governance*, *landscape approach*, dan *global value chain* dalam satu kerangka pengukuran yang dapat diterapkan pada konteks Sulawesi Tenggara.

Abstract

Oil palm is a strategic commodity for Indonesia, yet its expansion brings deforestation, land degradation, biodiversity loss, tenure conflicts, weak traceability, and a capacity gap between companies and smallholders. These issues create a dilemma between economic and foreign-exchange interests and ecological and social sustainability, particularly in Southeast Sulawesi, whose context differs from the main producing provinces. This study develops a sustainable oil palm governance model from upstream to downstream and formulates the Landscape-Based Sustainable Palm Oil Governance Index (ITKSB-L). A mixed-methods exploratory sequential design integrated literature review, policy analysis, value chain analysis, expert assessment, stakeholder surveys, and spatial analysis. The synthesis identifies five dimensions: spatial governance and legality, ecological sustainability, economic performance, social sustainability, and institutional and value chain governance, operationalized into an index on a 0–100 scale. The model treats sustainability as a cross-actor, cross-scale governance system rather than a certification instrument, integrating social-ecological systems, governance, landscape approach, and global value chain perspectives.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Agribisnis global mengalami perubahan paradigma dari orientasi produksi menuju sistem produksi yang semakin memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Transformasi tersebut terjadi karena sistem pangan dan agribisnis tidak hanya dituntut menghasilkan komoditas dalam jumlah besar, tetapi juga harus mampu menjamin keberlanjutan sumber daya alam, kesejahteraan produsen, keamanan rantai pasok, serta penerimaan pasar internasional. FAO (2024) menempatkan transformasi sistem *agrifood* sebagai agenda penting karena aktivitas produksi dan konsumsi pangan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menimbulkan biaya tersembunyi terhadap lingkungan, kesehatan, dan masyarakat.

Dalam konteks komoditas perkebunan tropis, kelapa sawit memiliki posisi yang sangat strategis. Produktivitas minyak yang relatif tinggi per satuan luas menjadikan sawit sebagai salah satu sumber minyak nabati utama dunia. Industri ini juga berkembang menjadi bagian penting dari industri pangan, oleokimia, kosmetik, dan energi. Di Indonesia, posisi strategis tersebut semakin kuat karena sawit berhubungan dengan ekspor, pendapatan masyarakat, lapangan kerja, serta kebijakan biodiesel.

Namun, keberhasilan ekonomi tersebut berjalan bersamaan dengan kritik terhadap dampak ekologis dan sosial (Bissonnette, 2016). Perkembangan perkebunan sawit di sejumlah wilayah tropis dikaitkan dengan perubahan penggunaan lahan, kehilangan hutan, degradasi ekosistem, emisi karbon, tekanan terhadap biodiversitas, dan konflik tenurial. Dengan demikian, sawit berada dalam suatu dilema pembangunan: semakin besar kontribusi ekonomi yang diharapkan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa proses produksinya tidak menghasilkan biaya ekologis dan sosial yang tidak dapat ditanggung oleh masyarakat maupun generasi mendatang.

Tuntutan tersebut semakin kuat melalui perubahan kebijakan pasar internasional. Regulation (EU) 2023/1115 atau *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) memasukkan minyak sawit sebagai salah satu komoditas yang berada dalam cakupan regulasi dan mensyaratkan produk terkait deforestasi memenuhi persyaratan tertentu sebelum dipasarkan di Uni Eropa (European Parliament & Council of the European Union, 2023). Perubahan tersebut menyebabkan daya saing sawit tidak lagi semata-mata ditentukan oleh harga dan produktivitas, tetapi semakin ditentukan oleh kemampuan menunjukkan legalitas, asal-usul produk, ketertelusuran, kepatuhan lingkungan, dan pemenuhan persyaratan keberlanjutan.

Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan industri kelapa sawit. Sawit memberikan kontribusi terhadap ekspor, industri nasional, pendapatan masyarakat, dan pengembangan energi berbasis biodiesel. Namun, kepentingan ekonomi tersebut harus berhadapan dengan persoalan keberlanjutan. Persoalan utama bukan semata-mata apakah sawit memberikan manfaat ekonomi atau menyebabkan dampak ekologis, melainkan bagaimana tata kelola sawit dapat memastikan manfaat ekonomi tersebut diperoleh tanpa menghasilkan eksternalitas ekologis dan sosial yang berlebihan.

Di sinilah terdapat kesenjangan antara fakta dan harapan. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai instrumen tata kelola, seperti regulasi kehutanan, tata ruang, perizinan, perlindungan lingkungan, sertifikasi, dan sistem ketertelusuran. Akan tetapi, keberadaan regulasi belum selalu identik dengan efektivitas implementasi. Kajian mengenai tata kelola ISPO menunjukkan adanya persoalan *low-functioning governance*, terutama akibat keterbatasan kelembagaan, sumber daya, koordinasi antarlevel pemerintahan, persoalan legalitas lahan, dan keterbatasan kapasitas pada tingkat lokal (*The Oil Palm Governance*, 2022).

Persoalan tersebut semakin kompleks pada sektor pekebun rakyat. Penelitian terbaru terhadap 1.541 rumah tangga pekebun dan 53 aktor rantai pasok di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan pekebun kecil dalam kebijakan *zero-deforestation* masih menghadapi persoalan kesadaran, *bottom-up traceability*, dukungan kapasitas, dan insentif ekonomi. Studi tersebut juga menemukan bahwa hanya sebagian kecil produsen nonindustri dapat menjual langsung ke pabrik, sementara sebagian besar bergantung pada perantara sehingga ketertelusuran menjadi persoalan penting (Chandra et al., 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang semakin ketat tidak otomatis menghasilkan keberlanjutan. Keberlanjutan memerlukan kapasitas kelembagaan, insentif ekonomi, data, teknologi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas aktor.

Sulawesi Tenggara memiliki struktur perekonomian yang kuat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. BPS mencatat bahwa kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor terbesar dalam struktur PDRB Sulawesi Tenggara pada 2023, yaitu sekitar 23,02 persen (BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025). Dalam subsektor perkebunan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang berkembang, meskipun skala Sulawesi Tenggara tidak dapat disamakan dengan provinsi sentra utama sawit seperti Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, atau Kalimantan Barat. Data BPS menunjukkan peningkatan produksi perkebunan rakyat kelapa sawit Sulawesi Tenggara dari 155,95 ton pada 2021 menjadi 206,50 ton pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan sawit di Sulawesi Tenggara perlu ditempatkan dalam konteks pertumbuhan ekonomi wilayah dan daya dukung lanskap, bukan sekadar peningkatan luas areal. Perspektif ini menjadi penting karena Sulawesi Tenggara memiliki bentang alam yang terdiri atas kawasan hutan, pertanian, perkebunan, pertambangan, permukiman, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, tata kelola sawit harus mempertimbangkan interaksi antarsektor dan antar-ekosistem.

Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk mengubah pendekatan tata kelola dari pertanyaan “bagaimana meningkatkan produksi sawit?” menjadi “bagaimana meningkatkan manfaat ekonomi sawit sekaligus menjaga fungsi sosial dan ekologis lanskap?” Pertanyaan kedua lebih relevan untuk pembangunan berkelanjutan karena menempatkan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan sebagai satu kesatuan (Pretty, 2008). Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan kebijakan ISPO. Perpres Nomor 16 Tahun 2025 mendefinisikan ISPO sebagai sistem usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Regulasi tersebut berlaku sejak 19 Maret 2025 dan menggantikan Perpres Nomor 44 Tahun 2020 (Republik Indonesia, 2025). Dengan demikian, terdapat peluang untuk mengembangkan instrumen pengukuran yang tidak hanya menilai kepatuhan unit usaha, tetapi juga menilai kualitas tata kelola pada tingkat lanskap.

Penelitian ini bertujuan untuk: a). menganalisis dinamika tata kelola perkebunan kelapa sawit dari hulu sampai hilir; b). mengidentifikasi hubungan antara dimensi ekonomi, sosial, ekologis, kelembagaan, dan rantai nilai; c). menganalisis tantangan tata kelola sawit berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara; d). mengembangkan model tata kelola sawit berkelanjutan berbasis lanskap; dan d). merumuskan Indeks Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Berbasis Lanskap (ITKSB-L) sebagai instrumen pengukuran kinerja keberlanjutan daerah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian dirancang menggunakan *mixed-methods* dengan pendekatan *exploratory sequential design*. Tahap pertama menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi dimensi dan indikator tata kelola. Tahap kedua menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memberikan bobot, melakukan pengukuran, dan menghitung indeks. Tahap ketiga menggunakan analisis spasial untuk memasukkan karakteristik lanskap. Struktur penelitian ditunjukkan pada Gambar 2, yang bergerak dari *literature review*, *policy analysis*, *expert assessment*, *stakeholder survey*, dan *spatial analysis*, menuju pembobotan, penyusunan ITKSB-L, dan rekomendasi kebijakan.



Gambar 2. Struktur dan tahapan penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian difokuskan pada Provinsi Sulawesi Tenggara dengan unit analisis yang dapat diturunkan sampai tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelompok pekebun, dan lanskap perkebunan. Kabupaten/kawasan dipilih secara *purposive* berdasarkan: a). keberadaan perkebunan sawit; b). keterkaitan dengan kawasan hutan; c). keberadaan pekebun rakyat; d). keberadaan industri/pabrik; e). potensi konflik tenurial; f). keterkaitan dengan DAS; dan tingkat risiko perubahan tutupan lahan.

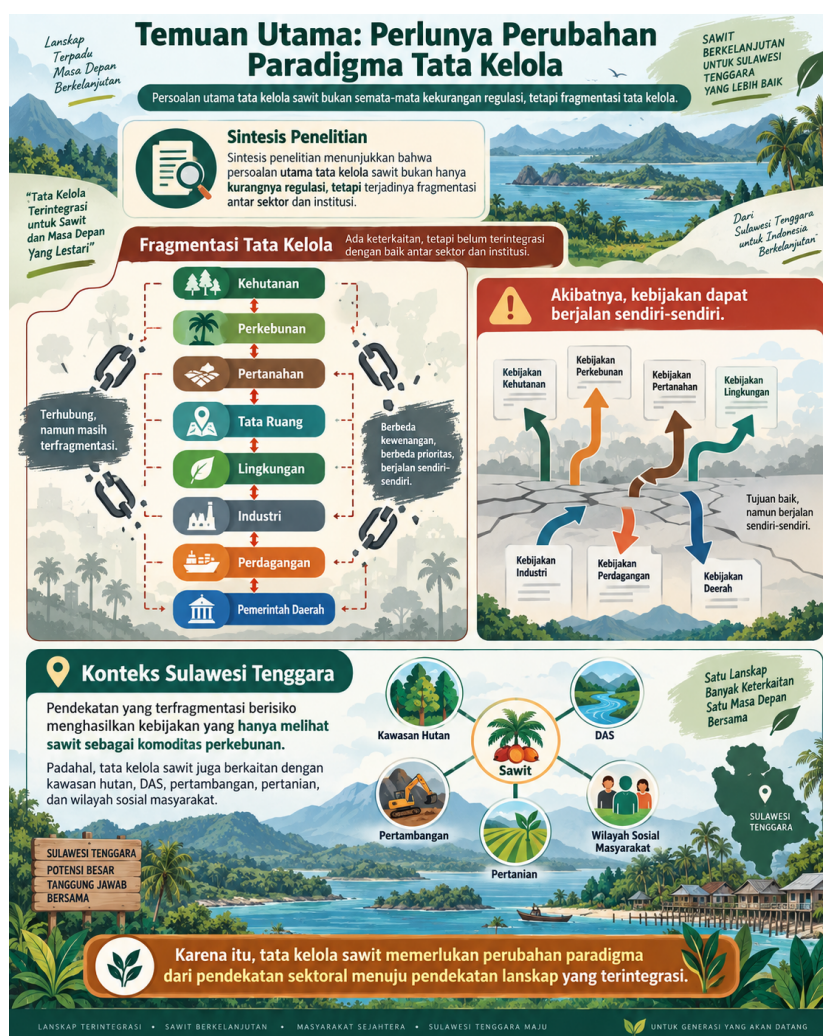
Sumber Data

Data primer dirancang diperoleh melalui survei pekebun; wawancara dengan pemerintah, perusahaan, kelompok tani, masyarakat, dan lembaga sertifikasi; *focus group discussion*; serta *expert judgment*. Data sekunder berasal dari BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah kabupaten, dokumen ISPO, dokumen perusahaan, data spasial, citra satelit, publikasi ilmiah, dan regulasi. BPS sendiri menyediakan statistik luas areal dan produksi perkebunan menurut provinsi serta status pengusahaan yang bersumber dari survei perusahaan perkebunan dan data perkebunan rakyat Ditjen Perkebunan (Badan Pusat Statistik, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Utama: Perlunya Perubahan Paradigma Tata Kelola

Sintesis penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama tata kelola sawit bukan semata-mata kekurangan regulasi, tetapi fragmentasi tata kelola. Fragmentasi terjadi antara sektor perkebunan, pertanian, tata ruang, lingkungan, industri, perdagangan, dan pemerintah daerah (Gambar 3). Akibatnya, kebijakan dapat berjalan sendiri-sendiri. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, pendekatan tersebut berisiko menghasilkan kebijakan yang hanya melihat sawit sebagai komoditas perkebunan, tanpa mempertimbangkan hubungan dengan kawasan hutan, DAS, pertambangan, pertanian, dan wilayah sosial masyarakat.



Gambar 3. Fragmentasi tata kelola sawit lintas sektor

Model Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Hulu–Hilir

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah *Landscape-Based Sustainable Palm Oil Governance Model*. Model terdiri atas lima dimensi utama sebagai berikut.

Dimensi 1: Tata ruang, legalitas, dan kepastian tenurial

Dimensi ini merupakan fondasi dengan urutan logika sebagai berikut.

Kesesuaian ruang → Legalitas lahan → Legalitas usaha → Kepastian tenurial → Pencegahan konflik

Tanpa kepastian ruang dan legalitas, keberlanjutan ekonomi maupun ekologis akan selalu rentan.

Dimensi 2: Keberlanjutan ekologis

Indikator meliputi deforestasi, perubahan tutupan lahan, perlindungan HCV, perlindungan sempadan sungai, konservasi tanah, risiko erosi, pengelolaan air, emisi, biodiversitas, dan rehabilitasi lahan. Pendekatan ini menempatkan lingkungan bukan sebagai biaya eksternal, tetapi sebagai modal produksi jangka panjang.

Dimensi 3: Kinerja ekonomi dan rantai nilai

Indikator meliputi produktivitas, biaya produksi, pendapatan pekebun, efisiensi, *replanting*, nilai tambah, hilirisasi, akses pasar, harga, dan kontribusi ekonomi daerah. Prinsip utamanya adalah *sustainable palm oil must remain economically viable*. Tanpa kelayakan ekonomi, petani akan sulit mempertahankan praktik keberlanjutan.

Dimensi 4: Keberlanjutan sosial

Indikator meliputi kepastian hak, partisipasi, pemberdayaan, kesejahteraan, hubungan kerja, kesetaraan, kelembagaan pekebun, mekanisme pengaduan, konflik tenurial, dan akses terhadap sumber daya. Pekebun harus ditempatkan sebagai **aktor utama**, bukan sekadar objek sertifikasi.

Dimensi 5: Tata kelola kelembagaan dan rantai pasok

Indikator meliputi koordinasi, transparansi, ISPO, *traceability*, data geospasial, *monitoring*, penegakan, kolaborasi multipihak, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas. Dimensi ini menjadi penghubung antara kebijakan dan praktik.

Pengembangan Indeks Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Berbasis Lanskap

Berdasarkan lima dimensi tersebut, penelitian mengembangkan ITKSB-L (*Indeks Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Berbasis Lanskap*) dengan skala 0–100 dan interpretasi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Interpretasi skor ITKSB-L

Skor	Kategori	Interpretasi
0–20	Sangat Rendah	Tata kelola sangat lemah
>20–40	Rendah	Banyak kesenjangan
>40–60	Sedang	Tata kelola mulai berjalan
>60–80	Baik	Tata kelola relatif efektif
>80–100	Sangat Baik	Tata kelola berkelanjutan dan terintegrasi

Struktur dimensi, bobot awal, dan contoh indikator ITKSB-L disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Struktur dimensi dan bobot awal ITKSB-L

Dimensi	Bobot Awal	Contoh Indikator
Tata ruang, legalitas & tenurial	20%	Kesesuaian ruang, legalitas lahan, konflik
Ekologi	25%	Deforestasi, HCV, erosi, air, biodiversitas
Ekonomi	20%	Produktivitas, pendapatan, nilai tambah
Sosial	15%	Partisipasi, kesejahteraan, kelembagaan
Governance & rantai nilai	20%	ISPO, <i>traceability</i> , <i>monitoring</i> , koordinasi
Total	100%	

Bobot tersebut merupakan bobot awal untuk pengembangan model, bukan bobot final. Pada penelitian empiris, bobot sebaiknya ditetapkan melalui AHP/Delphi atau metode pembobotan lain berdasarkan *expert judgment*, kemudian diuji sensitivitasnya.

Formula Indeks

Secara matematis, ITKSB-L dirumuskan sebagai berikut.

$$ITKSB-L = \sum (w_i \times S_i) \text{ dengan } \sum w_i = 1$$

dengan ITKSB-L adalah nilai indeks tata kelola sawit berkelanjutan berbasis lanskap; w_i adalah bobot dimensi/indikator; S_i adalah skor standar setiap dimensi/indikator; dan $\sum w_i = 1$. Untuk indikator positif, semakin tinggi nilai berarti semakin baik keberlanjutan. Untuk indikator negatif seperti deforestasi, erosi, konflik, dan degradasi, semakin tinggi nilai berarti semakin buruk keberlanjutan, sehingga perlu dilakukan *reverse scoring*.

Matriks Indikator Operasional

Operasionalisasi indikator beserta metode pengukuran dan sumber datanya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks indikator operasional ITKSB-L

Dimensi	Indikator	Metode Pengukuran	Sumber
Legalitas	Kesesuaian RTRW/RDTR	Overlay GIS	Pemerintah
Legalitas	Legalitas kebun	Persentase kebun legal	Dinas/pekebun
Tenurial	Konflik lahan	Jumlah/intensitas konflik	Wawancara
Ekologi	Deforestasi	Perubahan tutupan hutan	Remote sensing
Ekologi	HCV	Persentase kawasan terlindungi	GIS/perusahaan
Ekologi	Risiko erosi	RUSLE/spasial	GIS
Ekologi	Kualitas air	Parameter kualitas air	Survei
Ekonomi	Produktivitas	ton/ha/tahun	Survei/BPS
Ekonomi	Pendapatan	Rp/rumah tangga/tahun	Survei
Ekonomi	Nilai tambah	Analisis rantai nilai	Perusahaan
Sosial	Partisipasi	Skor partisipasi	Survei
Sosial	Kelembagaan	Indeks kelembagaan	Survei
Sosial	Kesejahteraan	Pendapatan/aset	Survei
Governance	ISPO	Status/kepatuhan	Dokumen
Governance	Traceability	Persentase TBS terlacak	Perusahaan
Governance	Monitoring	Frekuensi monitoring	Pemerintah/perusahaan
Governance	Kolaborasi	Network/governance score	FGD
Governance	Transparansi	Akses data	Stakeholder

Keunggulan Konseptual ITKSB-L

Indeks yang ditawarkan berbeda dari indeks keberlanjutan konvensional karena tidak hanya mengukur kondisi perusahaan. ITKSB-L mengukur kinerja unit usaha, kinerja rantai nilai, kinerja kelembagaan, kinerja sosial, dan kinerja ekosistem dalam satu sistem lanskap. Dengan demikian, suatu wilayah tidak dapat memperoleh skor tinggi hanya karena perusahaan memiliki sertifikat keberlanjutan apabila deforestasi masih tinggi, konflik tenurial belum terselesaikan, pekebun tidak memperoleh manfaat, *traceability* lemah, atau tata kelola antarlembaga tidak berjalan.

Analisis Kritis: Mengapa Pendekatan Lanskap Diperlukan?

Persoalan keberlanjutan sawit memiliki karakter lintas batas administratif. Satu DAS dapat mencakup beberapa kabupaten, satu rantai pasok dapat mencakup banyak desa, satu konflik tenurial dapat berkaitan dengan beberapa institusi, dan satu perubahan tutupan lahan dapat menghasilkan dampak hidrologis di wilayah lain. Karena itu, pendekatan administrasi semata memiliki keterbatasan. *Landscape governance* menawarkan pendekatan yang lebih sesuai karena menghubungkan batas ekologis dan sosial dengan batas administratif.

Sawit, Devisa, dan Keberlanjutan Ekosistem

Dilema utama kebijakan sawit dapat digambarkan melalui dua jalur. Pada pendekatan ekonomi sempit, rantai logikanya adalah sebagai berikut.

$$\text{Ekspansi} \rightarrow \text{Produksi} \uparrow \rightarrow \text{Ekspor} \uparrow \rightarrow \text{Devisa} \uparrow$$

Namun jalur ini berpotensi diikuti oleh peningkatan deforestasi, degradasi, konflik, dan risiko pasar. Sebaliknya, pendekatan berkelanjutan yang ditawarkan model ini bertumpu pada peningkatan produktivitas, efisiensi, hilirisasi, *traceability*, dan konservasi, yang bermuara pada kenaikan nilai ekonomi, penurunan risiko ekologis, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan daya saing. Dengan demikian, solusi bukan memilih antara ekonomi atau lingkungan, tetapi mengubah struktur tata kelola sehingga keuntungan ekonomi diperoleh melalui praktik yang semakin efisien dan berkelanjutan.

Pekebun Rakyat sebagai Titik Kritis

Literatur terbaru menunjukkan bahwa kebijakan *zero-deforestation* masih menghadapi persoalan keterjangkauan terhadap pekebun independen. Studi terhadap 1.541 rumah tangga pekebun menemukan lemahnya kesadaran terhadap persyaratan *zero-deforestation*, keterbatasan *bottom-up traceability*, hampir tidak adanya dukungan kapasitas khusus, dan minimnya diferensiasi harga (Chandra et al., 2026). Temuan tersebut memberikan implikasi penting bagi Sulawesi Tenggara. Jika ITKSB-L hanya mengukur perusahaan, maka indeks akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Oleh karena itu, dimensi pekebun harus menjadi bagian penting dari indeks, dengan prinsip bahwa tidak ada sawit berkelanjutan tanpa pekebun yang berkelanjutan. Keberlanjutan pekebun memerlukan legalitas, modal, teknologi, kelembagaan, akses pasar, *replanting*, dan insentif keberlanjutan (Li, 2024).

Traceability sebagai Infrastruktur Tata Kelola

Traceability merupakan salah satu komponen penting dalam menghadapi perubahan pasar global. Namun *traceability* tidak boleh hanya dipahami sebagai kemampuan mengetahui pabrik tujuan TBS. *Traceability* idealnya mencakup rangkaian berikut.

Koordinat kebun → Status legalitas → Petani → Kebun → Pengumpul → PKS → CPO → Produk hilir → Pasar

Dengan demikian, *traceability* menjadi infrastruktur tata kelola, bukan sekadar alat perdagangan. Hal tersebut menjadi semakin penting dalam menghadapi EUDR karena minyak sawit termasuk komoditas yang tercakup dalam regulasi tersebut (European Parliament & Council of the European Union, 2023).

Perbandingan Model Lama dan Model yang Ditawarkan

Perbedaan mendasar antara pendekatan konvensional dan model ITKSB-L dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan model lama dan model ITKSB-L

Aspek	Model Lama	Model ITKSB-L
Unit pengelolaan	Perusahaan/kebun	Lanskap
Fokus	Produksi	Ekonomi–sosial–ekologi
Regulasi	Sektoral	Terintegrasi
Pekebun	Objek	Aktor utama
Lingkungan	Mitigasi	Integrasi sejak perencanaan
Konflik	Penyelesaian setelah terjadi	Pencegahan dan resolusi
Data	Administratif	Geospasial + sosial-ekonomi
Rantai nilai	Terfragmentasi	Terintegrasi
Pasar	Output	Sustainable value chain
Evaluasi	Sertifikasi/kepatuhan	Indeks kinerja lanskap

Proposisi Penelitian

Model konseptual menghasilkan beberapa proposisi yang dapat diuji pada penelitian empiris, yaitu:

Proposisi 1: semakin tinggi kepastian tata ruang dan legalitas lahan, semakin tinggi kinerja tata kelola keberlanjutan sawit. Proposisi 2: semakin tinggi produktivitas pada lahan eksisting, semakin rendah tekanan terhadap ekspansi areal baru. Proposisi 3: semakin tinggi kapasitas kelembagaan pekebun, semakin tinggi kemampuan memenuhi standar keberlanjutan dan *traceability*. Proposisi 4: kolaborasi multipihak memperkuat hubungan antara kebijakan keberlanjutan dan hasil ekologis. Proposisi 5: *traceability* memperkuat hubungan antara kepatuhan tata kelola dan akses pasar berkelanjutan. Proposisi 6: tata kelola berbasis lanskap menghasilkan kinerja keberlanjutan yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan berbasis unit usaha semata.

Implikasi Manajerial bagi Perusahaan

Bagi perusahaan agribisnis, model ITKSB-L memberikan lima agenda strategis, yaitu: a). *Risk mapping*: perusahaan harus mengetahui lokasi kebun, status lahan, risiko deforestasi, risiko konflik, dan risiko lingkungan. b). *Supplier engagement*: pemasok tidak cukup diawasi, tetapi harus dibina. c). *Traceability*: seluruh rantai pasok perlu memiliki sistem data yang dapat diverifikasi. d). *Landscape partnership*: perusahaan perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. e). *Sustainability investment*: investasi keberlanjutan harus dipandang sebagai investasi untuk mempertahankan akses pasar jangka panjang.

Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemerintah Provinsi dapat menjadikan ITKSB-L sebagai (1) instrumen evaluasi kebijakan; (2) alat pemetaan risiko; (3) dasar penentuan prioritas intervensi; (4) basis koordinasi lintas OPD; (5) instrumen monitoring perkebunan; (6) dasar pemberian insentif; dan (7) alat komunikasi keberlanjutan kepada pasar. Arsitektur kelembagaan dapat dibangun dengan alur berikut.

Gubernur → Forum Tata Kelola Sawit Berkelanjutan → Sekretariat/Koordinator → Kehutanan, Perkebunan, Pertanahan, Lingkungan, Tata Ruang, Perdagangan → Kabupaten/Kota → Desa/Kelompok Pekebun → Perusahaan & Industri

Dengan demikian, ITKSB-L bukan hanya indeks statistik, tetapi menjadi *management dashboard* bagi pemerintah daerah.

Implikasi bagi Pembangunan Sulawesi Tenggara

Model ini memiliki relevansi lebih luas karena pembangunan perkebunan di Sulawesi Tenggara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kawasan hutan, pertanian, pertambangan, DAS, pesisir, dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, prinsip yang dikembangkan adalah “satu komoditas tidak boleh dikelola dengan mengorbankan fungsi lanskap.” Kelapa sawit harus ditempatkan sebagai salah satu komponen dalam pembangunan wilayah. Dengan demikian, keberhasilan sawit bukan hanya berapa ton produksi yang dihasilkan, tetapi juga berapa besar nilai ekonomi yang diciptakan, berapa besar pendapatan masyarakat meningkat, berapa banyak konflik dapat dicegah, berapa banyak hutan dapat dipertahankan, dan seberapa kuat daya dukung ekologis tetap terjaga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya melalui peningkatan produktivitas, sertifikasi, atau pengawasan perusahaan. Keberlanjutan sawit merupakan persoalan sistem yang melibatkan interaksi antara tata ruang, legalitas, produksi, pekebun, perusahaan, industri, pasar, masyarakat, dan ekosistem. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, pendekatan berbasis lanskap menjadi penting karena perkebunan berinteraksi dengan kawasan hutan, pertanian, DAS, pertambangan, permukiman, dan wilayah sosial masyarakat. Penelitian ini menawarkan *Landscape-Based Sustainable Palm Oil Governance Model* yang terdiri atas lima dimensi utama, yaitu: a). tata ruang, legalitas, dan kepastian tenurial; b). keberlanjutan ekologis; c). kinerja ekonomi dan rantai nilai; d). keberlanjutan sosial; dan e). tata kelola kelembagaan dan rantai pasok. Kelima dimensi tersebut dioperasionalkan dalam Indeks Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Berbasis Lanskap (ITKSB-L) dengan rentang skor 0–100. Kontribusi utama model ini adalah menggeser evaluasi keberlanjutan dari pendekatan yang berorientasi pada unit usaha menjadi pendekatan yang mengintegrasikan perusahaan, pekebun, rantai nilai, kelembagaan, dan ekosistem dalam satu kesatuan lanskap.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia 2024: Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Karet, Teh, dan Komoditas Perkebunan Unggulan*. Badan Pusat Statistik.
- Bissonnette, J.-F. (2016). Is oil palm agribusiness a sustainable development option for Indonesia? A review of issues and options. *Canadian Journal of Development Studies*, 37(4), 446–465.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. (2025). *Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka 2025*. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Chandra, A., Grabs, J., Meemken, E.-M., Hidayat, N. K., Dharmawan, A. H., Mardiyarningsih, D. I., et al. (2026). Limited reach of zero-deforestation commitments to Indonesian oil palm smallholders. *Nature Sustainability*.
- European Parliament and Council of the European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/1115 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation*.
- Food and Agriculture Organization. (2024). *The State of Food and Agriculture 2024: Value-driven transformation of agrifood systems*. FAO.
- Li, T. M. (2024). Securing oil palm smallholder livelihoods without more deforestation in Indonesia. *Nature Sustainability*, 7, 387–393.
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>

- Pretty, J. (2008). Agricultural sustainability: Concepts, principles and evidence. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1491), 447–465.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2024). *RSPO Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil*.
- The oil palm governance: Challenges of sustainability policy in Indonesia. (2022). *Sustainability*, 14(3), 1820